

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peranan guru sangat besar dalam menghadapi tantangan era globalisasi dan teknologi yang semakin maju. Tantangan tersebut menuntut guru untuk terus mengembangkan kreativitasnya dalam hal mengajar baik yang berkaitan dengan metode, strategi, dan teknik dalam pembelajaran. Di samping mengembangkan kompetensi profesional, guru juga dituntut untuk mengembangkan kompetensi pedagogik sehingga akan menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

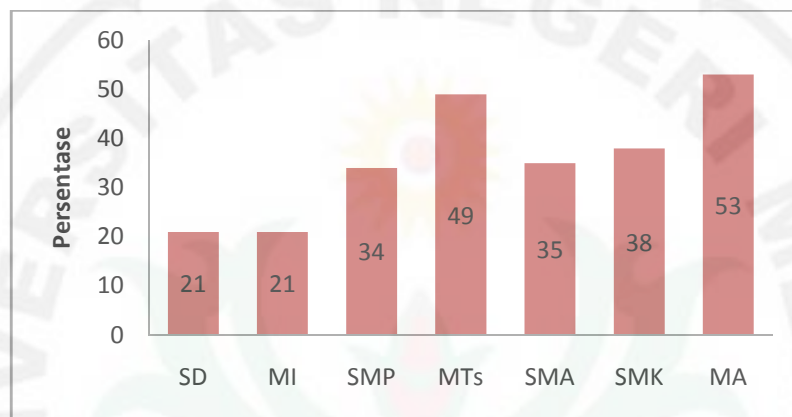
UU no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU no. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, menegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas cukup berat dalam mendidik dan mengajar peserta didik. Bab IV pasal 8 UU no. 14 Tahun 2005 disebutkan juga bahwa “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Selanjutnya pasal 9 menyatakan: “Kualifikasi akademik yang dimaksud dalam pasal 8 adalah diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S-1) atau program diploma empat (D-IV)”. Demikian juga pada pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”. Berdasarkan undang-undang di atas maka kompetensi merupakan salah satu syarat wajib yang harus di miliki bagi guru profesional.

Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) rekapitulasi sementara, kompetensi guru di Indonesia masih sangat memprihatinkan, ini terlihat dari hasil nilai rata-rata yang diperoleh pada Uji Kompetensi Awal (UKA) tahun 2012 yaitu 42,45. Adapun, hasil uji untuk guru yang sudah disertifikasi hanya mampu meraih nilai rata-rata 44,55. Jika dirinci lagi, maka diperoleh untuk SMA, nilai rata-rata terendah UKG adalah guru mata pelajaran kimia, yaitu 37,9. Sementara itu, nilai rata-rata tertinggi guru SMA adalah guru mata pelajaran fisika, yaitu 58,70 (<http://disdik.acehselatankab.go.id/disdik/index.php>). Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa kompetensi pedagogik atau metode pengajaran guru dan kompetensi profesional guru masih rendah, khususnya untuk guru rumpun mata pelajaran.

*Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program* (PECAPP) juga melaporkan tentang gambaran tingkat kompetensi guru di Aceh sebagai berikut: (1) 68% guru di tingkat sekolah dasar belum memiliki kelayakan mengajar, (2) jumlah guru terlatih masih minim yaitu 1,16% di tingkat SD, sedangkan 6,36% di tingkat SMP dan 3,97% di tingkat SMA, (3) hasil uji kompetensi awal guru tahun 2012 menempatkan Aceh pada peringkat ke-28 secara nasional dengan nilai rata-rata 36, (4) guru lulus sertifikasi rata-rata 20,9% di tingkat SD, 29% di tingkat SMP dan 31% di SMA//SMK (<http://www.belanja publikaceh.org/pendidikan/kompetensi-guru-masih-lemah>).

Laporan Dinas Pendidikan Aceh Tengah juga menyebutkan bahwa capaian guru dan kepala sekolah yang tersertifikasi tahun 2012 adalah sebagai berikut: (1) tingkat SD/MI 21%, (2) tingkat SMP 34%, (3) tingkat MTs 49%, (4) tingkat SMA 35%, (5) tingkat SMK 38% , dan (6) tingkat MA 53% . Ini menunjukkan terdapat

kesenjangan tingkat kompetensi guru dan kepala sekolah yang terjadi antarsatuan pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2012. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 1.1.



**Gambar 1.1 Persentase guru dan kepala sekolah tersertifikasi menurut jenjang pendidikan di Aceh Tengah, 2012**

(Sumber: Dinas Pendidikan Aceh, 2012)

Imron (2012:4—5) juga menambahkan kenyataan yang terjadi di lapangan yakni: (1) seringnya guru mengeluhkan kurikulum yang sering berubah, (2) seringnya guru mengeluhkan kurikulum yang sarat beban, (3) seringnya guru mengeluh mengajar guru yang tidak menarik, dan (4) masih belum dapat dijaminnya mutu pendidikan sebagaimana yang dikehendaki.

Kompetensi pedagogik berhubungan dengan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan pusat perhatian pada peserta didik, mulai dari penguasaan karakteristik peserta didik, prinsip pembelajaran, pengembangan penilaian, pemanfaatan penilaian dan melakukan tindakan refleksi sebagai evaluasi diri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun, kompetensi profesional berkaitan dengan pengetahuan guru secara profesional, mulai dari penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan; penguasaan standar

kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu; sampai dengan pemanfaatan teknologi sebagai pengembangan diri.

Segala upaya telah dilakukan pemerintah dalam mempersiapkan guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan kompetensi guru untuk melakukan pengawasan dan pembinaan guru. Pengawasan dan pembinaan tersebut diantaranya dilakukan oleh pengawas sekolah berupa supervisi akademik. Supervisi memiliki arti upaya yang diberikan kepada guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, sehingga guru mampu membantu peserta didik dalam belajar untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Supervisi menjadi fokus utama dalam pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki dan membina proses pembelajaran guru sehingga menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Supervisi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya peningkatan baik mutu pembelajaran dan mutu penyelenggaraan sekolah. Sehingga tujuan dari supervisi itu adalah untuk memberikan layanan dan bantuan dalam meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Layanan dan bantuan yang diberikan tersebut tidak saja untuk memperbaiki kemampuan mengajar guru namun juga mengembangkan potensi kualitas guru itu sendiri.

Arif (2008:167) dalam penelitiannya menjelaskan tentang beberapa persoalan yang cukup urgen untuk dijadikan alasan, mengapa supervisi diperlukan dalam proses pendidikan.

*Pertama*, perkembangan kurikulum yang merupakan gejala kemajuan pendidikan berbagai disiplin ilmu. Perkembangan tersebut sering menimbulkan perubahan-perubahan struktur maupun fungsi kurikulum. Pelaksanaan kurikulum tersebut memerlukan penyesuaian terus-menerus

dengan keadaan nyata di lapangan. *Kedua*, pengembangan profesi guru senantiasa merupakan upaya terus-menerus dari suatu organisasi profesi keguruan. Guru memerlukan peningkatan karir, pengetahuan, dan keterampilan. *Ketiga*, tuntutan pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak bagi keberadaannya manusia. Pendidikan pada hakekatnya adalah menjadikan manusia sebagai individu yang beriman dan bertaqwa kepada *al-Khâliq*, beretika, berakhlakul karimah, berbudaya, berilmu pengetahuan, dan mempunyai kecakapan serta keterampilan. *Keempat*, tuntutan agama. Agama pada dasarnya dimiliki oleh setiap manusia yang dilahirkan ke alam dunia. Agama dipandang sebagai fitrah manusia. *Kelima*, tuntutan sosiologis dan kultural. Pada aspek ini, manusia dipandang sebagai individu yang mempunyai kecenderungan untuk hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk bermasyarakat, manusia harus memiliki rasa tanggung jawab sosial dan tanggungjawab kebudayaan.

Harian Atjehpos mengungkapkan hasil nilai rata-rata UN tingkat SMA Provinsi Aceh menurut jurusan, dan peringkat nasional dari tahun 2007/2008 sampai 2012/2013 berdasarkan laporan BSNP Kemendiknas pada Tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1 Hasil Nilai Rata-rata UN Tingkat SMA Provinsi Aceh Menurut Jurusan, dan Peringkat Nasional dari Tahun 2007/2008 sampai 2012/2013**

No	Tahun Pelajaran	Jurusan IPA			Jurusan IPS		
		Nilai UN Rata-rata Aceh	Nilai UN Rata-rata Nasional	Peringkat UN Nasional	Nilai UN Rata-rata Aceh	Nilai UN Rata-rata Nasional	Peringkat UN Nasional
1	2007/2008	6,83	7,48	26	6,02	7,08	31
2	2008/2009	7,65	7,61	13	6,74	7,05	20
3	2009/2010	7,71	7,81	13	7,12	7,18	15
4	2010/2011	7,75	8,11	21	7,19	7,65	24
5	2011/2012	7,98	7,86	11	7,53	7,45	14
6	2012/2013	6,46	6,64	33	5,49	6,07	33

Sumber : BSNP Kemendiknas (Dinas Pendidikan Aceh)

Berdasarkan tabel tersebut, secara rata-rata dalam lima tahun tersebut tingkat kelulusan siswa SMA baik jurusan IPA maupun IPS sebesar 89,62%, sedangkan rata-rata kelulusan secara nasional sebesar 96,90%, dengan rata-rata peringkat kelulusan secara nasional pada peringkat 23 dari 33 provinsi di

Indonesia. Walaupun tingkat kelulusan siswa SMA di provinsi Aceh dari tahun ke tahun terus membaik, namun pada tahun pelajaran 2010/2011 turun sebesar 1,71%, dan pada tahun 2011/2012 mengalami kenaikan hanya sebesar 0,19%, dengan tingkat kelulusan sebesar 99,39%. Pada tahun 2012/2013 tingkat kelulusan SMA gabungan IPA dan IPS Provinsi Aceh mengalami penurunan sebesar 6,02% dengan tingkat kelulusan sebesar 93,37%, sedangkan secara nasional tingkat kelulusan sebesar 99,02%. Pada tahun pelajaran 2013/2014 tingkat kelulusan SMA IPA dan IPS Provinsi Aceh naik menjadi 96,89%, tetapi masih di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 99,52%.

Imron (2012:5) juga mengemukakan bahwa:

...rendahnya nilai murni siswa SMA/SMK, banyaknya lulusan SMA/SMK yang tidak dapat bekerja sesuai bidangnya, senjangnya kesempatan kerja yang tersedia dengan angkatan kerja yang ada, merupakan persoalan yang bersentuhan dengan kualitas pendidikan. Berdasarkan fakta ini maka guru-guru perlu di supervisi terus-menerus kemampuan profesionalnya.

Namun, sikap guru terhadap supervisi masih memiliki persepsi yang kurang tepat. Persepsi tersebut terlihat dari banyaknya guru yang memahami supervisi sebagai suatu pengawasan (inspeksi). Hal ini menurut Sahertian (2008: 35) akan mengakibatkan rasa tidak puas guru dalam pelaksanaan supervisi sehingga muncul dua sikap yang tampak dalam kinerja guru yaitu (1) acuh tak acuh, dan (2) menantang (agresif). Padahal istilah inspeksi dan supervisi memiliki makna dan kawasan manajemen yang berbeda. Inspeksi memiliki esensi membangun kepatuhan pada perundang-undangan dan peraturan kelembangaan yang mengikat. Adapun, supervisi memiliki esensi kepatuhan profesional dalam arti seseorang yang menjalankan tugasnya didasarkan atas teori, konsep, prinsip, hasil validasi empirik, dan kaidah-kaidah etik yang berlaku.

Maka, melalui supervisi diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa bantuan dan binaan terhadap guru dalam proses pembelajaran dan mengevaluasi guru dalam capaian kompetensi dasar mengajar. Pelaksanaan supervisi agar efektif dilakukan oleh pengawas, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut: sering dan sistematis, konsisten, fokus pada keterampilan mengajar, berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan tujuan, diarahkan untuk memberikan akurat, tepat waktu, pertemuan balikan kinerja harus objektif dan relevan, diagnosis dan preskriptif, serta memiliki tujuan yang berorientasi.

Beberapa pemahaman guru tentang supervisi adalah bahwa kegiatan supervisi yang dilakukan oleh pengawas sekolah (1) diidentikkan dengan evaluasi, sehingga guru merasa tertekan karena merupakan rutinitas bagi pengawas sekolah, (2) supervisi dilakukan untuk mencari kesalahan guru, akibatnya guru merasa takut jika pengawas sekolah datang, (3) supervisi yang dilakukan pengawas hanya sekedar memeriksa perangkat pembelajaran dan menganjurkan guru agar menyiapkan perangkat pembelajaran tanpa melakukan pembinaan terhadap guru, (4) pertemuan balikan yang diberikan kepada guru hanya bersifat pengarahan yang mengedepankan kekuasaan, (5) bagi guru yang berbeda dengan disiplin ilmu yang diampu pengawas sekolah hanya sekedar memeriksa kelengkapan dokumen perangkat pembelajaran saja, dan (6) keluhan guru tidak pernah dihiraukan ataupun tidak dilakukan suatu pendekatan sehingga permasalahan yang dihadapi guru tidak terselesaikan.

Pengawas sekolah berdasarkan Peraturan Pemerintah no 74 tahun 2008 adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah. Sudjana (2012:29) menjelaskan bahwa kewajiban dan tugas pokok pengawas

sekolah adalah tercapainya mutu pendidikan di sekolah binaannya. Pengawasan manajerial dan pengawasan akademik merupakan wujud yang dilakukan pengawas sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kepengawasaan manajerial dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sekolah yang meliputi perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kependidikan dan sumber daya lainnya. Kepengawasan akademik dilakukan untuk membantu dan membina guru dalam upaya perbaikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Masih menurut Sudjana (2012:29) mengatakan bahwa tidak berlebihan jika menempatkan pengawas sekolah sebagai penjamin mutu pendidikan pada sekolah binaannya.

Kenyataannya pengawas sekolah belum dapat menjalankan tugas pokok dan kewajibannya. Hal ini berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, diantaranya penelitian Ruswandi (2011) menemukan bahwa:

Intensitas kedatangan pengawas sekolah untuk memberikan pembinaan akademik masih kurang karena kehadiran pengawas sekolah dalam satu bulan paling banyak hanya 3 kali. Sehingga pemberian layanan bantuan dan bimbingan akademik pengawas sekolah kurang representatif. Kemudian ketika pengawas sekolah datang ke sekolah, pengawas jarang sekali melakukan kunjungan kelas untuk memberi bantuan dan bimbingan akademik tetapi lebih banyak duduk di kantor atau ruang kepala sekolah untuk membahas persoalan administrasi sekolah. Selain itu, ketika pengawas sekolah melaksanakan kunjungan supervisi akademik ke kelas, masih ada guru-guru yang berperilaku kaku dan takut terhadap atasan, sehingga guru tidak berani berinisiatif dan berinovasi dalam mengelola pembelajarannya.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Agung dan Yufriawati (2013: 29) yakni kenyataan di lapangan kerap kali menunjukkan seorang guru yang menghadapi kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran, bersikap pasif dan kurang menunjukkan upaya untuk mengatasinya. Salah satu cara yang mungkin di peroleh adalah dengan meminta bantuan dan bimbingan klinis dari pengawas



sekolah, tetapi hal ini tidak atau jarang terjadi. Pengawas sekolah kurang menunjukkan sikap proaktif untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi guru dan memberikan bantuan serta bimbingan pembelajaran yang diperlukan oleh guru. Kekurang harmonisan dan sinergitas hubungan kerja jelas menjadi salah satu faktor yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi pencapaian hasil pendidikan.

Supervisi klinis merupakan salah satu model pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan pengawas sekolah sebagai upaya untuk membantu guru dalam memperbaiki proses pembelajaran secara sistematis. Praktik supervisi klinis didasari oleh dua asumsi. Pertama, pembelajaran merupakan aktivitas yang sangat kompleks yang memerlukan pengamatan dan analisis secara hati-hati. Melalui pengamatan dan analisis ini, seorang supervisor pendidikan akan dengan mudah dalam mengembangkan kemampuan guru mengelola proses pembelajaran. Kedua, guru-guru yang profesionalismenya ingin dikembangkan lebih menghendaki cara kesejawatan daripada cara yang otoriter (Sergiovanni dan Starratt, 1987:4). Pada mulanya, supervisi klinis dirancang sebagai salah satu model atau pendekatan dalam melakukan supervisi akademik terhadap calon guru yang sedang berpraktik mengajar. Supervisi ini penekanannya pada klinis yang diwujudkan dalam bentuk hubungan tatap muka (*face to face*) antara supervisor dan calon guru yang sedang berpraktik.

Proses supervisi klinis ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu (1) pertemuan awal, (2) observasi mengajar, dan (3) pertemuan balikan. Tahapan-tahapan tersebut dipergunakan untuk mengembangkan inovasi pembelajaran. Jadi tujuan umum dari

ketiga pokok dalam supervisi klinis adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan mengajar guru di kelas dan di luar kelas

Penerapan supervisi klinis menurut Sagala (2012b:196) dapat menjamin kualitas pelayanan belajar secara berkelanjutan dan konsisten. Sergiovanni, yang dikutip oleh Lovell dan Wiles (1983:171) menyebutkan kerangka acuan pelaksanaan supervisi klinis perlu menyediakan satu kesempatan guru untuk (1) menguji, mendiskusikan, dan menjelaskan lengkap program-program pembelajaran, (2) menerima pertemuan balikan yang objektif pada program-program yang dilatih, (3) menguji hubungan antara perilaku nyata dan yang diantisipasi di kelas, (4) menguji hubungan antara konsekuensi yang diinginkan dan konsekuensi nyata dari perilaku supervisor dan guru, (5) menguji hubungan antara program disertai asumsi-asumsi, teori-teori dan riset tentang pengajaran yang efektif, dan (6) mengembangkan, mengimplementasikan, dan menerima dukungan tentang perubahan-perubahan yang sesuai dengan program-program pendidikan yang praktis.

Beberapa faktor yang mendorong perlunya dikembangkan supervisi klinis.

Faktor-faktor tersebut, adalah:

- a. Dalam kenyataannya yang dikerjakan supervisi ialah mengadakan evaluasi guru-guru saja. Di akhir semester guru-guru mengisi skala penilaian yang diisi oleh peserta didik mengenai bagaimana cara mengajar guru.
- b. Pusat pelaksanaan supervisi ialah supervisor, tidak berpusat pada apa yang dibutuhkan guru, baik kebutuhan profesional sehingga guru-guru tidak merasa memperoleh sesuatu yang berguna bagi perkembangan profesinya.

- c. Dengan menggunakan *merit rating* (alat penilaian kemampuan guru) aspek-aspek yang diukur terlalu umum. Sangat sukar untuk mendeskripsikan tingkah laku guru yang paling mendasar seperti yang mereka rasakan karena diagnosis nya tidak mendalam, tapi sangat bersifat umum dan abstrak.
- d. Pertemuan balikan yang diperoleh dari hasil pendekatan sifatnya arahan, petunjuk, intruksi, tidak menyentuh masalah manusia yang terdalam yang dirasakan guru-guru, sehingga hanya bersifat di permukaan.
- e. Tidak diciptakan hubungan identifikasi dan analisis diri, sehingga guru-guru melihat konsep dirinya.
- f. Melalui diagnosis dan analisis dirinya sendiri guru menemukan dirinya. Ia sadar akan kemampuan dirinya dan timbul motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk memperbaiki dirinya sendiri. Praktik-praktik supervisi yang tidak manusiawi itu menyebabkan kegagalan dalam pemberian supervisi kepada guru-guru ( Sahertian, 2008:37—38).

Optimalisasi supervisi klinis pada guru harus dilakukan untuk mencari terobosan improvisasi pelaksanaan pembelajaran di samping dalam upaya menghindari kejenuhan rutinitas yang cenderung jalan di tempat sehingga tidak ada perbaikan dan perubahan yang terjadi dalam pembelajaran peserta didik sebagai *output* proses pendidikan. Selain itu, supervisi klinis berupaya “membantu guru” dengan terlebih dahulu menjalin hubungan yang akrab sebagai syarat keberhasilan dalam pelaksanaan supervisi yang belum dilakukan oleh para pengawas.

Namun, hasil wawancara informal dengan pengawas sekolah Kabupaten Aceh Tengah, 10 Februari 2014, menjelaskan bahwa jarang bahkan tidak pernah,

guru-guru yang meminta bimbingan klinis kepada mereka sehubungan dengan pelaksanaan tugas pembelajaran, seperti pemanfaatan metode, pemahaman terhadap materi, dan sebagainya. Selain itu, Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang diharapkan sebagai wadah bagi guru untuk usaha meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan guru kerap kali belum cukup digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi guru.

Mi (2012), pengawas sekolah, dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pelaksanaan supervisi klinis yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja guru dalam mengelola pembelajaran belum maksimal. Ada beberapa hambatan yang dialami kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi klinis yaitu: (a) berasal dari guru, pada saat akan melaksanakan supervisi masih ada guru yang enggan untuk disupervisi, meskipun sudah terjadwal. Selain itu, seringnya guru dipanggil untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan baik di tingkat provinsi maupun nasional; dan (b) berasal dari kepala sekolah, seringnya rapat yang diadakan Dinas Pendidikan secara mendadak. Adanya pertemuan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Adanya penataran dan pelatihan baik di tingkat provinsi maupun nasional. Banyaknya sosialisasi atau MoU tentang penambahan ruang belajar maupun pemberian sarana lainnya yang diadakan baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Paparan di atas baru sebatas pemahaman yang bersumber dari pengamatan sementara di lapangan sehingga masih terlalu dini untuk diambil suatu kesimpulan. Oleh sebab itu, perlu dilihat secara nyata dalam usaha yang sistematis

untuk mengkaji masalah melalui penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian tentang implementasi supervisi klinis oleh pengawas sekolah pada guru mata pelajaran matematika dalam meningkatkan keterampilan mengajar di SMA Negeri di Kota Takengen. Alasan pentingnya penelitian ini dilakukan adalah (1) belum maksimalnya supervisi yang diberikan pada guru dan (2) belum maksimalnya refleksi guru terhadap proses pembelajaran yang berakhir pada hasil pembelajaran siswa yang dilakukan oleh pengawas sekolah, padahal banyak para peneliti mengungkapkan bahwa supervisi klinis efektif dalam meningkatkan proses pembelajaran.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, bahwa terdapat beberapa faktor untuk mengembangkan supervisi klinis. Jadi, secara umum dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: (1) masih belum maksimalnya supervisi klinis yang dilakukan pengawas sekolah kepada guru binaannya, (2) implementasi supervisi klinis oleh pengawas sekolah belum sesuai dengan langkah-langkah supervisi klinis, (3) pertemuan balikan yang diberikan pada guru masih bersifat arahan, petunjuk, dan intruksi, (4) supervisi yang dilakukan masih belum sesuai dengan kebutuhan guru.

### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berkaitan dengan implementasi supervisi klinis yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah dalam Rumpun/ Mata Pelajaran MIPA pada guru mata pelajaran matematika SMA Negeri di Kota Takengen.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, rumusan masalahnya adalah “Bagaimanakah implementasi supervisi klinis oleh pengawas sekolah pada guru mata pelajaran matematika SMA Negeri di Kota Takengen?”

Selanjutnya rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimanakah langkah-langkah pertemuan awal yang dilakukan pengawas sekolah terhadap guru binaannya?
2. Bagaimanakah langkah-langkah observasi cara mengajar guru yang dilakukan pengawas sekolah terhadap guru binaannya?
3. Bagaimanakah langkah-langkah pertemuan balikan yang dilakukan pengawas sekolah terhadap guru binaannya?

### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi supervisi klinis oleh pengawas sekolah terhadap guru mata pelajaran matematika SMA Negeri di Kota Takengen dalam:

1. Mengungkapkan langkah-langkah pertemuan awal yang dilakukan pengawas sekolah terhadap guru binaannya.

2. Mengungkapkan langkah-langkah observasi yang dilakukan pengawas sekolah terhadap guru binaannya.
3. Mengungkapkan langkah-langkah pertemuan balikan yang dilakukan pengawas sekolah terhadap guru binaannya

#### **F. Manfaat Penelitian**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam (1) memperkaya khazanah mengenai supervisi klinis yang dilakukan oleh pengawas sekolah; (2) menganalisis proses supervisi klinis yang dilakukan oleh pengawas sekolah pada sekolah binaannya; (3) mendeskripsikan upaya Pengawas Sekolah yang dapat diterapkan untuk menyukseskan tujuan pendidikan nasional.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak:

1. Pengawas sekolah dalam Rumpun Mata Pelajaran: sebagai pertemuan balikan terhadap pengembangan supervisi pengawas sekolah khususnya yang berkaitan dengan supervisi klinis, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh komponen sekolah.
2. Guru: dapat meningkatkan kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik serta mengevaluasi diri dalam proses pembelajaran melalui supervisi klinis yang dilakukan oleh pengawas sekolah.
3. Kepala sekolah: sebagai bahan masukan dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada guru sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran dan perencanaan pembelajaran.

4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah: dapat mengambil kebijakan dalam melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap tugas pengawas sekolah dalam melaksanakan supervisi klinis.
5. Peneliti selanjutnya: sebagai bahan acuan penelitian dalam mengamati dan memberikan masukan yang berkaitan dengan usaha sadar untuk memperbaiki mutu pendidikan yang salahsatunya melalui supervisi klinis.

